

**PENGARUH KOMPETENSI DAN ORIENTASI PENGGUNA
TERHADAP KUALITAS SOSIALISASI SERTA PENGARUHNYA PADA
KESADARAN UNTUK MENTAATI PERATURAN DI BIDANG
KEUANGAN NEGARA**

**Heru Setiawan
Universitas Diponegoro**

ABSTRACT

The Low Fraud Control Plan (FCP) due to the low level of adherence of stakeholders BPKP Central Java province to the provisions of the legislation it can be seen from the increasingly widespread disclosure of Corruption both cases handled by the Prosecutor and Police Investigator. This is evident from the amount of aid giving expert testimony in court given BPKP Representative of Central Java Province from 2009 to 2011 has increased. The phenomenon of the gap between the change in strategy by the realization is still not in line, then it will be a problem of low awareness of stakeholders on the legislation in the field of public finance. Referring to the problem formulated in this study is "How to raise awareness to obey the rules in the financial sector".

The research problems that have led researchers to develop a research model. The research model developed involving four research variables, namely competence, user orientation, quality socialization and consciousness obey the rules by five research hypotheses. Data about the competence, user orientation, quality socialization and awareness obey the rules obtained through open-ended questionnaire with representative stakeholders BPKP Central Java Province who received socialization and socialization Corruption Prevention Program in Finance State. The data obtained were then analyzed by using analysis of Structural Equation Modeling (SEM).

Statistical tests were performed on a model developed research shows that the model according to the population estimates. In hypothesis testing showed that the competence and user orientation proved positive and significant impact on the quality of socialization socialization and quality proved positive and significant effect on the consciousness obey the rules while testing the effect of competence and orientation of the user to obey the rules of consciousness is not proven effect.

Keywords: competence, user orientation, quality of dissemination, awareness obey the rules

PENDAHULUAN

Pembangunan sistem dalam rangka pencegahan korupsi yang telah dikembangkan oleh BPKP adalah *Fraud Control Plan* (FCP). Sedangkan strategi represif berupa Audit Investigatif, Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan. Namun demikian strategi represif tersebut masih tetap tinggi, sementara implementasi FCP dilingkungan Instansi Pemerintah masih rendah.

Target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa perubahan paradigma dengan mengedepankan strategi *preventif* yang ditetapkan oleh BPKP masih belum sejalan dengan realisasi kinerja. Realisasi kinerja menunjukkan masih lebih mengedepankan strategi lama yaitu strategi *represif* dari pada *preventif*.

Perubahan paradigma juga terjadi dalam hal penugasan, dimana BPKP tidak lagi sebagai inisiator berdasarkan rencana yang telah dituangkan dalam Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), tapi penugasan atau realisasi PKPT berdasarkan permintaan dari Stakeholder BPKP. Sehingga penugasan atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan PKPT yang dilakukan oleh BPKP sepenuhnya mendasarkan pada keinginan/minat stakeholder untuk menggunakan jasa BPKP. Rendahnya realisasi implementasi FCP juga dipengaruhi oleh sedikitnya stakeholder yang meminta BPKP untuk membantu menyusun program pencegahan korupsi. Hal ini terlihat dari 806 jumlah Dinas dan Lembaga Teknis lainnya di Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 hanya sebanyak 21 permintaan FCP atau sebesar 2,61%, baik untuk sosialisasi, *diagnostic assessment* maupun implementasi. Upaya BPKP dalam melakukan pencegahan baik melalui program pencegahan maupun sosialisasi program anti korupsi sudah dilakukan setiap tahun. Rendahnya permintaan tersebut juga disebabkan masih rendahnya tingkat ketaatan stakeholder BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini terlihat dari semakin maraknya pengungkapan kasus Tindak Pidana Korupsi baik yang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan maupun Kepolisian. Hal ini terlihat dari jumlah bantuan pemberian keterangan ahli di persidangan yang diberikan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 semakin meningkat.

Fenomena gap antara perubahan strategi dengan realisasi masih belum sejalan, maka hal tersebut akan menjadi masalah berupa “**Rendahnya kesadaran Stakeholder terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Keuangan Negara**”.

Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi masalah penelitian adalah “**Bagaimana meningkatkan kesadaran untuk taat peraturan di bidang keuangan negara?**”.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN MODEL PENELITIAN

Kesadaran Taat Peraturan

Sadar hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor M.01-PR.08.10 TAHUN 2006, menyatakan bahwa Kesadaran Hukum Masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Patuh (*compliance*) merupakan taat pada aturan, ketaatan terhadap aturan tersebut tidak hanya taat pada aturan secara tertulis, tapi patuh pada makna/ruh dari aturan itu sendiri.(Edward, J. dan Simon, W, 2006).

Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat timbul karena dua hal, yaitu pelanggaran hukum dianggap biasa dan hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan kehidupan (Rahmat, Didi, 2013). Aminah (1997), dalam Nurhidayat (2006), Julian, (2014) menyatakan bahwa kesadaran hukum dapat dilihat dari empat hal, yaitu (1) pengetahuan terhadap perilaku yang diatur oleh hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum, (2) pemahaman terhadap isi peraturan hukum. Seseorang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan, (3) sikap terhadap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum, dan (4) perilaku sesuai hukum dimana seseorang mematuhi peraturan yang berlaku.

Kualitas Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan adalah proses pengkomunikasian kepada Stakeholder. Menurut Schiffman dan Kanuk (2000) dalam Sangadji dan Sopiah (2013), komunikasi adalah transmisi sebuah pesan dari pengirim ke penerima melalui medium transmisi.

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sosialisasi anti korupsi di Jawa Tengah merupakan suatu upaya dari Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan serta kesadaran kepada Instansi Pemerintah dan masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan di bidang keuangan negara.

Kualitas sosialisasi peraturan keuangan negara adalah persepsi dari peserta sosialisasi mengenai suatu baik buruk, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya) tentang upaya Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang Keuangan Negara termasuk didalamnya masalah Kerugian Negara.

Mengacu pada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu upaya yang dilakukan untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran *stakeholder* tentang program pencegahan korupsi dan program-program di bidang keuangan negara.

Kompetensi

Kompeten dan kompetensi merupakan istilah yang banyak digunakan dalam organisasi. Kompeten menurut Sunarto (2005) menggambarkan apa yang diperlukan karyawan agar mampu melakukan pekerjaan dengan baik. Kompeten diperoleh dengan mengupas bidang pekerjaan ke dalam komponen-komponen dan menghubungkannya dengan elemen dasar kinerja. Seluruh elemen kecakapan adalah sebuah gambaran tentang sesuatu dimana karyawan harus mampu melakukan hal tertentu. Sistem ini menilai orang berdasarkan kategori "sudah mampu" atau "belum mampu". Penekanannya pada apa yang harus dilakukan oleh karyawan bukan pada perilaku apa dalam melaksanakan pekerjaan. Kompeten lebih berkaitan dengan efek bukan pada upaya dan lebih berkaitan dengan output

dari pada input. Sedangkan Sandberg, J (2000) menyatakan, kompetensi dipandang sebagai sekumpulan atribut yang spesifik yaitu pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang digunakan dalam melakukan pekerjaan tertentu.

Orientasi Pelanggan

Brown et., al. (2002) mendefinisikan orientasi pelanggan sebagai tendensi atau kecenderungan karyawan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dalam konteks kerja. Brown et., al (2002) juga mengemukakan bahwa dalam melakukan pelayanan orientasi pelanggan terdiri dari dua dimensi. *Need dimention* atau dimensi kebutuhan, dimensi ini merepresentasikan kebutuhan seorang penyedia jasa untuk dipercaya mampu memberikan kepuasan terhadap pelanggan. *Enjoyment dimention* atau dimensi kenikmatan merepresentasikan derajat kecenderungan saat mereka memberi pelayanan kepada pelanggan sekaligus mereka menikmati dalam melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelanggan tersebut.

Orientasi pelanggan dapat dianalisis berdasarkan dua level, yaitu analisis pada level organisasi dan level individu pemberi jasa (Stock dan Hoyer, 2005). Penelitian yang dilakukan untuk mengukur orientasi pelanggan pada tingkat individu pemberi jasa dilakukan oleh Saxe dan Weitz (1982) dan Brown, et., al. (2002) yang menyatakan bahwa orientasi pelanggan merupakan sebuah penilaian diri dari kecenderungan karyawan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan derajat dimana mereka menikmati melakukannya. Orientasi pengguna merupakan nilai-nilai BPKP yang dimaknai sebagai orientasi pelanggan.

Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Sosialisasi Peraturan dan Kesadaran Taat Peraturan

Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, agar sosialisasi peraturan keuangan negara dapat berkualitas maka sosialisasi peraturan perlu didukung oleh kompetensi petugas atau narasumber agar proses sosialisasi dapat berjalan baik.

Penelitian yang dilakukan Ahmad, Sriyuniati, Fauzi, Seprini (2011) menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas sosialisasi peraturan perpajakan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hadiningsih (2011) dan Utami, Andi, dan Soerono (2013) menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pegawai memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap sosialisasi peraturan pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H1: Kompetensi petugas berpengaruh positif terhadap kualitas sosialisasi peraturan perundang-undangan keuangan negara

H2: Kompetensi petugas berpengaruh positif terhadap kesadaran taat peraturan perundang-undangan keuangan negara

Pengaruh Orientasi Pengguna terhadap Kualitas Sosialisasi Peraturan dan Kesadaran Taat Peraturan

Sosialisasi Peraturan terutama di bidang Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP memberikan pemahaman kepada stakeholder baik dalam hal pengelolaan keuangan negara maupun pemahaman terkait dengan program anti korupsi.

Penelitian yang dilakukan Cross, M.E, et al (2007) menguji pengaruh orientasi pelanggan dan kinerja tenaga penjual dimana dalam penelitian tersebut kinerja tenaga penjual dilihat dari dimensi kualitas dan kuantitas. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa orientasi pelanggan berpengaruh positif terhadap kinerja baik dilihat dari dimensi kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dikembangkan adalah:

H3: Orientasi pengguna berpengaruh positif terhadap kualitas sosialisasi peraturan

H4: Orientasi pengguna berpengaruh positif terhadap kesadaran taat peraturan perundang-undangan keuangan negara

Pengaruh Kualitas Sosialisasi Peraturan terhadap Kesadaran Taat Peraturan

Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman namun juga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penyelenggara negara/daerah. Pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran seseorang untuk taat (Lusia Rohmawati, et al, 2013). Penelitian kualitas sosialisasi terhadap kesadaran taat peraturan banyak dilakukan pada sektor perpajakan. Seperti yang dikatakan oleh Adiyati (2009) bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kegiatan sosialisasi yang semakin meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati, Prasetyono, dan Rimawati (2013) pada variabel sosialisasi peraturan perpajakan dan kesadaran untuk taat pajak menunjukkan bahwa sosialisasi peraturan perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kesadaran untuk taat peraturan perpajakan.

Penelitian Herryanto dan Toly (2013) juga menunjukkan adanya pengaruh sosialisasi peraturan perpajakan dengan kesadaran untuk taat pajak yang ditunjukkan oleh penerimaan penghasilan di KPP.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Winerungan (2013) juga menunjukkan hal yang sama dimana sosialisasi peraturan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H5: Kualitas sosialisasi peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran untuk taat peraturan perpajakan

METODE PENELITIAN

Populasi

Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh Stakeholder Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah yang pernah mendapat sosialisasi Program Pencegahan Korupsi dan Sosialisasi di bidang Keuangan Negara.

Sampel

Hair, dkk dalam Ferdinand (2011) dan Ghozali (2011) menemukan bahwa ukuran sampel yang sesuai untuk SEM adalah antara 100 – 200 sampel. Penentuan jumlah sampel untuk analisis *Structural Equation Modeling* menggunakan rumus (Ferdinand, 2011) jumlah indikator x 5 sampai 10. Oleh karena dalam penelitian ini terdapat 16 indikator, maka jumlah sampel minimal yang digunakan adalah 112 orang responden.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive convenience sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan cara seseorang diambil sebagai sampel yang sesuai dengan penelitian ini yaitu dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Provinsi Jawa Tengah baik pusat maupun daerah yang telah menerima Sosialisasi Program Anti Korupsi, *Fraud Control Plan* (FCP), dan Sosialisasi Peraturan Dibidang Keuangan Negara.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi variabel bebas (*independent*), yaitu kompetensi dan orientasi pengguna, variabel mediator kualitas sosialisasi dan variabel terikat (*dependent*) kesadaran untuk taat peraturan. Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel penelitian dapat dijelaskan pada tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Indikator	Definisi Konseptual	Definisi Operasional		Indikator
Kompetensi	Kompetensi dipandang sebagai sekumpulan atribut yang spesifik yaitu pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) yang digunakan dalam melakukan pekerjaan tertentu. (Sandberg, J, 2000)	Kemampuan pegawai BPKP sebagai narasumber dipandang dari pengetahuan dan keahliannya dalam memberikan sosialisasi di bidang Keuangan Negara.	X1	Pengalaman Narasumber
			X2	Keahlian Narasumber di Bidang Keuangan Negara
			X3	Penguasaan Narasumber terhadap masalah Keuangan Negara
Orientasi pengguna	orientasi pelanggan sebagai tendensi atau kecenderungan karyawan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dalam konteks kerja. (Brown, et. al, 2002)	Kecenderungan narasumber dari BPKP saat memberikan sosialisasi dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan di Bidang Keuangan Negara termasuk Pencegahan Korupsi.	X4	Memberi informasi dengan baik
			X5	Memberi penjelasan
			X6	Memecahkan masalah
			X7	Membantu pengambilan keputusan
			X8	Memberikan rasa aman
			X9	Ramah

Indikator	Definisi Konseptual	Definisi Operasional		Indikator
Kualitas sosialisasi anti korupsi	Kualitas adalah persepsi dari konsumen karena sifatnya yang tidak nyata (<i>intangible</i>) serta produksi dan konsumsinya berjalan secara simultan atau bersamaan (Heizer dan Renden, 2009).	Persepsi dari konsumen yang dalam hal ini adalah stakeholder BPKP mengenai suatu baik buruk, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya) tentang upaya dalam rangka mensosialisasikan peraturan perundang-undangan	X10	Mudah dimengerti
			X11	Penguasaan materi sosialisasi
			X12	Memberikan motivasi
			X13	Sikap Narasumber
Kesadaran untuk taat peraturan	Nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Permenkumham Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006).	Nilai-nilai yang tumbuh dalam diri stakeholder BPKP untuk mengikuti aturan dibidang keuangan negara dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.	X14	Pengetahuan Peraturan Keuangan Negara
			X15	Pemahaman Peraturan Keuangan Negara
			X16	Mengikuti aturan

Sumber: Boles, et al (2001); Never dan Slater (1994); Sandberg (2000); dan Brown et.al(2002) dikembangkan untuk penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yaitu suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan angket atau daftar pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan kepada responden/obyek penelitian.

Skala Pengukuran

Skala data jawaban responden atas pertanyaan penelitian yang dilakukan Randall dan Gibson (1991); Trongmateerut dan Sweeney (2012); Yoon, Cheolho (2010); Cronan dan Al-Rafee (2007) menggunakan *Agree-Disagree Scale* yang menghasilkan jawaban sangat tidak setuju – jawaban sangat setuju dalam rentang nilai 1 s/d 7.

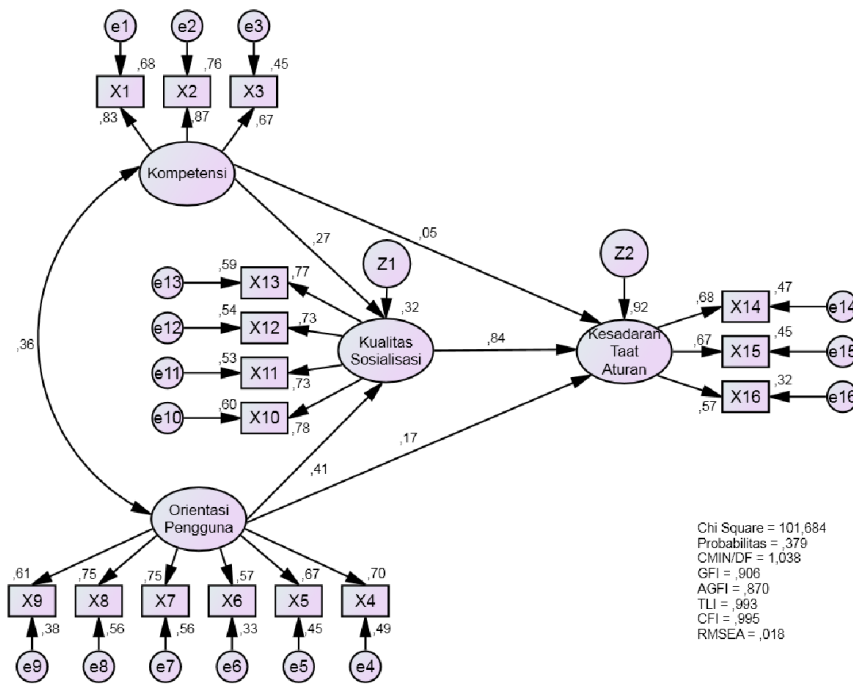
Tehnik Analisis Data

Untuk menguji model dan hubungan yang dikembangkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik analisis. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Structural Equation Modeling* (SEM).

ANALISIS DATA

Pengujian pada *Full Model* yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Gambar 1 Analisis Full Model



Sumber : Data Primer yang Diolah, 2014

Seperti halnya dalam confirmatory factor analysis, pengujian *Structural Equation Model* yang dilakukan dengan dua macam pengujian, yaitu kesesuaian model serta uji signifikansi kausalitas melalui uji koefisien regresi (Ferdinand, 2005).

1. Uji Kesesuaian Model – *Goodness of Fit Test*

Indeks-ideks kesesuaian model yang digunakan sama seperti pada konfirmatori factor analysis. Pengujian model SEM ditujukan untuk melihat kesesuaian model. Adapun hasil pengujian *goodness of fit* pada full model yang dikembangkan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2
Goodness Of Fit Test Full Model

<i>Goodness of Fit Indeks</i>	<i>Cut off Value</i>	Hasil	Evaluasi Model
χ^2 (df = 98; α = 5%) = 122,103	< 122,103	101,628	Baik
Probabilty	$\geq 0,05$	0,379	Baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0,018	Baik
GFI	$\geq 0,90$	0,906	Baik
AGFI	$\geq 0,90$	0,87	Marginal
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,038	Baik
TLI	$\geq 0,95$	0,993	Baik
CFI	$\geq 0,95$	0,995	Baik

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2014

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Chi Square = 101,628 dengan nilai signifikansi 0,379 selain itu nilai-nilai indeks CMIN/DF, GFI, TLI, CFI, dan RMSEA juga dalam rentang nilai yang diharapkan, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara matriks kovarians sample dan matriks kovarians populasi yang diestimasi.

2. Uji Kausalitas

Setelah melakukan penilaian terhadap asumsi-asumsi yang ada pada SEM, selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian lima hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan nilai *Critical Ratio* (CR) dari suatu hubungan kausalitas.

Tabel 3
Pengujian Hipotesis

			Std Estimate	S.E.	C.R.	P	
			Estimate				
Kualitas_Sosialisasi	<---	Kompetensi	,271	,255	,107	2,383	,017
Kualitas_Sosialisasi	<---	Orientasi_Pengguna	,406	,440	,132	3,345	***
Kesadaran_Taat_Aturan	<---	Kualitas_Sosialisasi	,838	,790	,156	5,073	***
Kesadaran_Taat_Aturan	<---	Kompetensi	,053	,047	,090	,524	,600
Kesadaran_Taat_Aturan	<---	Orientasi_Pengguna	,173	,177	,112	1,580	,114

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2014

a. Pengujian Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Sosialisasi

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh kompetensi terhadap kualitas sosialisasi menunjukkan nilai CR sebesar 2,383 dengan probabilitas sebesar 0,017. Oleh karena nilai probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas sosialisasi.

b. Pengujian Pengaruh Kompetensi terhadap Kesadaran Taat Aturan

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh kompetensi terhadap kesadaran taat aturan menunjukkan nilai CR sebesar 0,524 dengan probabilitas sebesar 0,600. Oleh karena nilai probabilitas > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas sosialisasi tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Taat Aturan secara langsung.

c. Pengujian Pengaruh Orientasi Pengguna terhadap Kualitas Sosialisasi

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh orientasi pengguna terhadap kualitas sosialisasi menunjukkan nilai CR sebesar 3,345 dengan probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena nilai probabilitas < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel orientasi pengguna terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas sosialisasi.

d. Pengujian Pengaruh Orientasi Pengguna terhadap Kesadaran Taat Aturan

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh kualitas sosialisasi terhadap kesadaran taat aturan menunjukkan nilai CR sebesar 1,58

dengan probabilitas sebesar 0,114. Oleh karena nilai probabilitas $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas sosialisasi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Taat Aturan.

e. Pengujian Pengaruh Kualitas Sosialisasi terhadap Kesadaran Taat Aturan

Parameter estimasi untuk pengujian pengaruh kualitas sosialisasi terhadap kesadaran taat aturan menunjukkan nilai CR sebesar 5,073 dengan probabilitas sebesar 0,000. Oleh karena nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas sosialisasi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap Kesadaran Taat Aturan.

Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Sosialisasi

Hasil pengujian statistik yang dilakukan pada variabel kompetensi dan kualitas sosialisasi menunjukkan bahwa kompetensi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sosialisasi.

Sosialisasi adalah proses seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap agar dapat berfungsi sebagai orang dewasa dan sekaligus sebagai pemeran aktif dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu di masyarakat. Oleh karena itu, agar sosialisasi peraturan keuangan negara dapat berkualitas maka sosialisasi peraturan perlu didukung oleh kompetensi petugas atau narasumber agar proses sosialisasi dapat berjalan baik. Oleh sebab itu, agar sosialisasi yang dilakukan memiliki kualitas yang baik maka perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik tentang program-program yang hendak disosialisasikan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik seperti pengetahuan dan pengalaman tentang program pencegahan korupsi dan program keuangan negara akan dapat mendukung sosialisasi program yang bersangkutan.

Pengaruh Kompetensi terhadap Kesadaran Taat Peraturan

Hasil pengujian statistik yang dilakukan pada variabel kompetensi dan kesadaran taat peraturan menunjukkan bahwa kompetensi terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesadaran taat peraturan.

Hal ini demikian karena kompetensi yang dimiliki seperti pengetahuan dan pengalaman yang baik mengenai program pencegahan korupsi serta program keuangan negara tidak serta merta mempengaruhi kepatuhan terhadap program pencegahan korupsi dan keuangan negara. Kompetensi yang berupa pengetahuan dan pengalaman tersebut justru seringkali digunakan sebagai celah untuk melakukan penyelewengan yang berujung pada terjadinya tindak korupsi. Tidak jarang ditemukan tindakan korupsi justru dilakukan oleh oknum yang notabene justru telah memiliki kompetensi yang baik di bidang program pencegahan korupsi dan keuangan negara.

Pengaruh Orientasi Pengguna terhadap Kualitas Sosialisasi

Hasil pengujian statistik yang dilakukan pada variabel orientasi pengguna dan kualitas sosialisasi menunjukkan bahwa orientasi pengguna terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sosialisasi.

Dalam pemberian pelayanan, peranan dan eksistensi pegawai sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pelayanan, dituntut untuk memahami kondisi objektif masyarakat dalam hal ini aparat PNS yang sedang berubah baik dalam sikap perilaku, tindakan ke arah budaya kerja yang profesional, efektif, efisien, hemat, bersahaja serta anti KKN. Orientasi pengguna dilihat dari dimensi individu atau pegawai BPKP secara personal untuk membantu stakeholder BPKP dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan dari stakeholder tanpa harus mengorbankan profesi. Sosialisasi Peraturan terutama di bidang Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP memberikan pemahaman kepada stakeholder baik dalam hal pengelolaan keuangan negara maupun pemahaman terkait dengan program anti korupsi.

Pengaruh Orientasi Pengguna terhadap Kesadaran Taat Peraturan

Hasil pengujian statistik yang dilakukan pada variabel orientasi pengguna dan kesadaran taat peraturan menunjukkan bahwa orientasi pengguna terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesadaran taat peraturan.

Orientasi pengguna tidak secara langsung memiliki pengaruh pada kesadaran taat peraturan. Hal ini demikian karena stakeholder sebagai institusi pemerintah memiliki tuntutan untuk melaksanakan *good governance* dan *clean governance*. Jadi pelaksanaan penggunaan program pencegahan korupsi dan keuangan negara belum merujuk pada keinginan untuk menjadi sebuah institusi yang memiliki kesadaran taat peraturan. Namun, lebih kepada pencitraan atau pemenuhan tuntutan pemerintah pusat pada *good governance* dan *clean governance*.

Pengaruh Kualitas Sosialisasi terhadap Kesadaran Taat Peraturan

Hasil pengujian statistik yang dilakukan pada variabel kualitas sosialisasi dan kesadaran taat peraturan menunjukkan bahwa orientasi pengguna terbukti berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesadaran taat peraturan.

Kegiatan sosialisasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman namun juga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penyelenggara negara/daerah. Pengetahuan dan pemahaman tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran seseorang untuk taat (Lusia Rohmawati, et al, 2013). Penelitian kualitas sosialisasi terhadap kesadaran taat peraturan banyak dilakukan pada sektor perpajakan. Seperti yang dikatakan oleh Adiyati (2009) bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kegiatan sosialisasi yang semakin meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Melalui kegiatan sosialisasi yang berkualitas dan dilakukan secara terus menerus maka akan dapat menjadi faktor yang mendorong tumbuhnya kesadaran stakeholder untuk taat peraturan tentang program pencegahan korupsi dan keuangan negara.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI MANAJERIAL

Kesimpulan Hipotesis

Hasil dari pengujian statistik yang telah diuraikan dalam Bab IV telah menunjukkan hasil mengenai keterpengaruhannya variabel-variabel penelitian. Berikut ini beberapa kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Pengujian pengaruh kompetensi dan kualitas sosialisasi dengan menggunakan data empiris menunjukkan bahwa kompetensi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas sosialisasi. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa agar sosialisasi program anti korupsi yang dicanangkan oleh BPKP menjadi sebuah program yang berkualitas maka pegawai BPKP yang memiliki tugas mensosialisasikan program pencegahan anti korupsi haruslah memiliki kompetensi yang handal di bidangnya.
2. Pengujian pengaruh orientasi pengguna dan kualitas sosialisasi dengan menggunakan data empiris menunjukkan bahwa orientasi pengguna terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas sosialisasi. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa agar sosialisasi program anti korupsi yang dicanangkan oleh BPKP menjadi sebuah program yang berkualitas maka sosialisasinya harus disesuaikan dengan orientasi dari masing-masing pengguna, yaitu lembaga pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengujian pengaruh langsung kompetensi terhadap kesadaran stakeholder untuk taat terhadap peraturan tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian ini berarti kesadaran stakeholder untuk taat terhadap peraturan tidak secara langsung dipengaruhi oleh kompetensi pegawai BPKP, tapi harus dilakukan melalui sosialisasi yang berkualitas kepada stakeholder.
4. Pengujian pengaruh langsung orientasi pengguna terhadap kesadaran stakeholder untuk taat terhadap peraturan tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian ini berarti kesadaran stakeholder untuk taat terhadap peraturan tidak secara langsung dipengaruhi oleh orientasi pegawai BPKP terhadap pengguna jasa BPKP, tapi harus dilakukan melalui sosialisasi yang berkualitas kepada stakeholder.
5. Pengujian pengaruh kualitas sosialisasi anti korupsi dan kesadaran taat aturan dengan menggunakan data empiris menunjukkan bahwa sosialisasi anti korupsi terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran taat aturan. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa sosialisasi harus dirancang dengan kualitas yang baik sehingga melalui sosialisasi tersebut dapat menumbuhkan kesadaran Stakeholder Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah untuk taat atau patuh terhadap peraturan sehingga tidak akan terjadi korupsi di lingkungan organisasi yang dipimpinnya.

Implikasi Teoritis

Penelitian ini merupakan *explanatory research* dengan pendekatan kausalitas, yaitu penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab akibat (*cause – effect*) antar beberapa konsep atau beberapa variabel yang

sudah atau pernah dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu, pengembangan hipotesis maupun model penelitian dilakukan dengan menggunakan justifikasi dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Maka dari itu, hasil dari penelitian ini memberikan implikasi teoritis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendasarinya. Adapun implikasi-implikasi teoritis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kompetensi terhadap kualitas sosialisasi program anti korupsi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahamad, Sriyunianti, Fauzi, Seprini (2011) yang juga menunjukkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas sosialisasi perturan perpajakan. Demikian pula dengan penelitian dari Hadiningsih (2011) dan Utami, Andi, dan Soerono (2013) yang juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh orientasi pengguna terhadap kualitas sosialisasi program anti korupsi. Hasil penelitian ini sejalan menjadi bukti empiris yang memperkuat teori yang disampaikan oleh Saxe dan Weitz (1982) dan Brown, et., al. (2002) bahwa orientasi pelanggan merupakan sebuah penilaian diri dari kecenderungan karyawan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan derajat dimana mereka menikmati melakukannya.
3. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kualitas sosialisasi program anti korupsi terhadap kesadaran taat aturan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rohmawati, Prasetyono, dan Rimawati (2013) pada variabel sosialisasi peraturan perpajakan dan kesadaran untuk taat pajak menunjukkan bahwa sosialisasi peraturan perpajakan terbukti berpengaruh terhadap kesadaran untuk taat peraturan perpajakan. Demikian pula dengan penelitian Herryanto dan Toly (2013) dan Winerungan (2013) yang juga menunjukkan hasil yang sama.

Implikasi Manajerial

Pengujian statistik yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran taat aturan anti korupsi dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi program anti korupsi. Kualitas sosialisasi program anti korupsi sendiri dipengaruhi oleh orientasi pengguna dan kemudian dipengaruhi oleh kompetensi. Mengacu pada hasil-hasil tersebut maka implikasi manajerial untuk meningkatkan kesadaran taat aturan anti korupsi diprioritaskan pada perbaikan orientasi pengguna dan kemudian didukung pula oleh kompetensi.

Tabel 4
Implikasi Manajerial untuk Orientasi Pengguna

Indikator		Indeks	Implikasi Manajerial
X4	Memberi informasi dengan baik	56,9	Membantu memberikan konseling dalam bentuk informasi yang sifatnya pengetahuan serta memberikan solusi atas permasalahan korupsi yang ditemukan di wilayah kerja
X5	Memberi penjelasan	56,9	
X6	Memecahkan masalah	58,9	
X7	Membantu pengambilan keputusan	52,4	BPKP menyediakan tim khusus yang bersedia ke lapangan untuk membantu melakukan evaluasi, membantu dalam proses perencanaan, dan membantu pelaksanaan program anti korupsi
X8	Memberikan rasa aman	53,1	Bekerja sama dengan lembaga perlindungan saksi untuk memberikan rasa aman kepada pelapor terhadap pelaporan tindakan korupsi
X9	Ramah	57,2	Mensosialisasikan peraturan dibidang keuangan negara termasuk program anti korupsi secara ramah dan bersahabat dengan menyediakan layanan konseling dan keluhan

Sumber: Dikembangkan untuk Penelitian ini, 2014

Berdasarkan hasil penelitian diatas, untuk meningkatkan kesadaran stakeholder untuk taat peraturan di bidang keuangan sebaiknya Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah melakukan Sosialisasi yang berkualitas. Sosialisasi yang berkualitas dapat tercapai apabila Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menugaskan Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang memiliki kompetensi dan berorientasi pada pengguna dalam hal ini Stakeholder BPKP.

Tabel 5
Implikasi Manajerial untuk Kompetensi

Indikator		Indeks	Implikasi Manajerial
X1	Pengalaman Narasumber	60,1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan narasumber yang memiliki kompetensi dan memiliki track record yang baik dalam program pencegahan anti korupsi, artinya narasumber diambil dari pegawai-pegawai yang memiliki pengalaman di bidang pencegahan korupsi 2. Narasumber diberikan pendidikan dan pelatihan mengenai program-program pencegahan korupsi dan keuangan negara 3. Memberikan studi banding kepada narasumber di wilayah, daerah, kota yang berhasil menjalankan program pencegahan korupsi
X2	Keahlian Narasumber di Bidang Keuangan Negara	58,4	
X3	Penguasaan Narasumber terhadap masalah Keuangan Negara	54,6	

Sumber: Dikembangkan untuk Tesis ini, 2014

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian berkaitan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan dari hasil penelitian ini yang tidak atau belum sesuai dengan teori maupun harapan peneliti. Adapun keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah masih adanya keengganan responden dalam menjawab pertanyaan terbuka sehingga temuan yang dapat digunakan untuk implikasi manajerial menjadi terbatas.

Agenda Penelitian Mendatang

Menyikapi keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini dengan menggunakan *Focus Group Discussion* sebagai metode yang dapat mendukung data kuantitatif agar temuan penelitian menjadi lebih dalam.

DAFTAR REFERENSI

- Aminah (1997), "Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengusaha dalam rangka penegakan hukum lingkungan: studi kasus industri kecil batik di Kotamadya Pekalongan", <http://www.digilib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-78068.pdf>, download tanggal 7 Januari 2014 jam 09.05.
- Andreasen AR. (1995), "Marketing Social Change: Changing Behavior to Promote Health, Social Development, and the Environment", San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Boles, James S., Babin, Barry J., Brashear, Thomas G., Brooks, Charles, 2001, "An examination of the relationships between retail work environments, Sales Person Orientation-Customer Orientation and Job Performance", *Journal of Marketing Theory and Practice*; Summer 2001; 9, 3.
- BPKP (2009), "Modul 1 Diklat SPIP: Gambaran Umum SPIP", Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2009.
- Brown, Tom J;Mowen, John C;Donavan, D Todd;Licata, Jane W, 2002, "The Customer Orientation Of Service Workers: Personality Trait Effects On Self and Supervisor Performance Rating", *Journal of Marketing Research*; Feb 2002; 39, 1.
- Bryant, Carol A., dan Grier Sonya, (2005); "Social marketing in Public Health", *Annual Review of Public Health*; 2005; 26.
- Cross, M.E, Brashear, Thomas, G, Edward E. Rigdon dan Danny N. Bellenger 2006, "Customer orientation and salesperson performance", *European Journal of Marketing*, Vol. 41, No. 7/8.
- Edward, Jonathan dan Simon, W., 2006, "A compliance competence partnership approach model", *Journal of Financial Regulation and Compliance*; 2006; 14, 2; pg. 140.
- Ferdinand, A., 2011, "Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian Untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen", BP Undip.
- Ghozali, I., 2013, "Model Persamaan Struktural: Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 21.0", BP Undip.

- Ginsberg, Ari, 1988, "Measuring And Modelling Changes In Strategy: Theoretical Foundations and Empirical Directions"; *Strategic Management Journal*; Nov/Dec; 9, 6.
- Julian, M., Iqbal, (2014), "Kesadaran Hukum Anggota Beat Borneo Community (BBC) Samarinda dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Samarinda", *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2014, 2 (1) : 1853-1863 ISSN 2338-3651, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2014, <http://kamusbahasaindonesia.org/sadar>, download tanggal 7 Januari 2014, jam 08.15.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63 Tahun 2003
- Kotler P, Roberto N, Lee N., 2002; "Social Marketing: Improving the Quality of Life"; Thousand Oaks, CA; Sage
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor M.01-PR.08.10 TAHUN 2006
- PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Rahmat, Didi, 2014, "Sikap Patuh Terhadap Hukum", <http://rachmatdidi.blogspot.com/2010/04/sikap-patuh-terhadap-hukum.html> download tgl 3 Januari 2014, jam 10.30.
- Rau, Devaki, 2008, "Top Management Team Social Processes And Changes In Organizational Strategy"; *Journal of Business and Management – Vol. 14, No. 1.*
- Rohmawati, Lusiana, (2013); Prasetyono; Rimawati, Yuni; "Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)".
- Sandberg, J., 2000, "Understanding human competence at work: An interpretative approach", *Academy of Management Journal*; Feb 2000; 43, 1.
- Saxe, R. dan Weitz, Barton A., "The SOCO scale: A measure of the customer orientation of salespeople", *Journal of Marketing Research (pre-1986)*; Aug 1982; 19.
- Shewchuk, R. M, O'Connor, Stephen J, Fine, David J, dan Tyler, J Larry, 2005, "Building an Understanding of the Competencies Needed for Health Administration Practice", *Journal of Healthcare Management*; Jan/Feb 2005; 50, 1.
- Sihombing, Elshima,(2009), "Kompetensi", <http://elsimasihombing.blogspot.com/2009/12/definisi-kompetensi.html> (download tanggal 13 Januari 2013 jam 15.10 WIB)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Winerungan, O., L., (2013), “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado dan Kpp Bitung”, Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 960-970.